

Analisis Wanprestasi Indonesia terhadap Perdagangan Internasional yang disebabkan oleh Peperangan Negara Palestina dan Israel

Barnabas Juni Saputra Gulo¹ Mohammad Rubby Sriyanto² Akbar Nur Rokhim³
Email: barnabas.205230075@stu.untar.ac.id¹ mohammad.20523000@stu.untar.ac.id²
akbar.205230002@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak konflik Palestina-Israel terhadap perdagangan internasional Indonesia, dengan fokus pada bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Peperangan tersebut menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok global, yang berdampak pada keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pakar perdagangan internasional dan pelaku bisnis, serta analisis dokumen dan laporan. Temuan menunjukkan bahwa diversifikasi pasar, penyusunan kontrak yang komprehensif, dan pengelolaan rantai pasok yang efektif adalah strategi kunci bagi perusahaan untuk mengelola risiko wanprestasi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus dan memperkuat infrastruktur logistik untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan geopolitik terhadap perdagangan internasional Indonesia.

Kata Kunci: Wanprestasi Indonesia, Perdagangan Internasional, Peperangan

Abstract

This research analyzes the impact of the Palestine-Israel conflict on Indonesia's international trade, focusing on the types of breaches of contract (wanprestasi) that occur and mitigation strategies that can be implemented. The conflict causes significant disruptions to the global supply chain, affecting Indonesian companies with delays in delivery, damaged goods, and contract violations. This study employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, collecting primary data through interviews with international trade experts and business practitioners, as well as document and report analysis. Findings indicate that market diversification, comprehensive contract drafting, and effective supply chain management are key strategies for companies to manage the risk of contract breaches. Additionally, the government needs to formulate specific regulations and strengthen logistics infrastructure to reduce the negative impact of geopolitical instability on Indonesia's international trade.

Keywords: Indonesian Default, International Trade, War



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini, situasi konflik antara Palestina dan Israel terus memanas, menimbulkan dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk perdagangan internasional. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini tidak hanya menyebabkan penderitaan manusia dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi di kawasan dan dunia¹. Ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah ini mengakibatkan berbagai konsekuensi ekonomi, mulai dari peningkatan harga minyak, gangguan pada rantai pasok global, hingga ketidakpastian pasar yang berdampak pada perdagangan internasional. Perang antara Palestina dan Israel sering kali melibatkan serangan militer yang intens, blokade ekonomi, dan berbagai tindakan balasan yang menghambat aktivitas ekonomi. Salah satu dampak langsung dari konflik ini adalah gangguan pada rute perdagangan utama. Terusan Suez, misalnya, yang merupakan jalur vital bagi perdagangan global, berada dalam radius pengaruh konflik ini.

¹ Sāmi 'Abd al-Razzāq 'Adwān et al., *Side by Side: Parallel Histories of Israel-Palestine* (New Press, 2012).21-22

Setiap ketidakstabilan di kawasan tersebut dapat menyebabkan penutupan sementara atau penundaan pengiriman barang, yang pada gilirannya mengakibatkan lonjakan biaya logistik dan harga barang di pasar internasional.

Selain itu, konflik berkepanjangan ini juga memicu ketidakpastian politik dan ekonomi yang berdampak pada keputusan investasi. Investor cenderung menghindari kawasan yang tidak stabil dan berisiko tinggi. Ketidakpastian ini dapat menurunkan investasi asing langsung (FDI) di kawasan, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara di sekitar wilayah konflik². Negara-negara yang bergantung pada perdagangan dengan Israel atau Palestina juga menghadapi risiko tambahan karena terganggunya hubungan dagang dan ketidakpastian pasokan. Perang ini mempengaruhi harga komoditas utama, terutama minyak dan gas. Timur Tengah adalah salah satu kawasan penghasil minyak terbesar di dunia, dan setiap gangguan di wilayah ini dapat memicu kenaikan harga minyak global. Kenaikan harga minyak tidak hanya mempengaruhi biaya energi, tetapi juga biaya produksi dan distribusi barang di seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan inflasi dan menurunkan daya beli konsumen, yang pada akhirnya mengurangi volume perdagangan internasional.

Di sisi lain, konflik Palestina-Israel juga berdampak pada sektor-sektor spesifik seperti pertanian dan teknologi. Palestina, khususnya, bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, termasuk pangan dan obat-obatan. Blokade dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan selama konflik menyebabkan kekurangan pasokan barang-barang penting, yang mengakibatkan krisis kemanusiaan. Bagi Israel, meskipun memiliki ekonomi yang lebih maju, perang terus-menerus dan ancaman keamanan mengalihkan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi dan inovasi teknologi. Tidak hanya itu, konflik ini juga menciptakan hambatan diplomatik dalam hubungan dagang internasional. Banyak negara yang terlibat dalam perdagangan dengan Israel atau Palestina menghadapi tekanan politik dan moral dari berbagai kelompok di dalam negeri dan dari komunitas internasional.³ Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perdagangan dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, yang dapat mengganggu aliran perdagangan normal dan menciptakan ketidakpastian tambahan.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keterlibatan signifikan dalam perdagangan internasional, juga merasakan dampak dari konflik ini. Indonesia memiliki hubungan dagang dengan berbagai negara di Timur Tengah, dan ketidakstabilan di kawasan tersebut dapat mempengaruhi ekspor dan impor. Selain itu, ketergantungan pada impor minyak dari Timur Tengah menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap fluktuasi harga minyak global yang dipicu oleh konflik. Ketidakpastian pasar juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi domestik secara keseluruhan. Pentingnya stabilitas kawasan Timur Tengah bagi perdagangan internasional tidak dapat diabaikan. Setiap eskalasi konflik berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi global. Negara-negara di kawasan ini perlu bekerja sama untuk menemukan solusi damai yang dapat mengakhiri konflik berkepanjangan dan mengembalikan stabilitas. Di sisi lain, komunitas internasional, termasuk Indonesia, perlu berperan aktif dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan⁴.

Untuk mengurangi dampak negatif dari konflik ini, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, diversifikasi sumber impor energi untuk mengurangi

² Omer Bartov, *Israel-Palestine: Lands and Peoples* (Berghahn Books, 2021).54

³ Meyland S. F. Wambrauw et al., "IN-DEPTH ANALYSIS OF THE DYNAMICS POST-ISRAEL-PALESTINE CONFLICT 2023: POLITICAL, ECONOMIC, AND SOCIAL IMPLICATIONS FOR THE FUTURE OF ISRAEL," *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS* 2, no. 1 (January 12, 2024): 223–36.

⁴ 'Adwān et al., *Side by Side*.37-38

ketergantungan pada minyak Timur Tengah. Kedua, memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain di luar kawasan konflik untuk menjaga stabilitas perdagangan. Ketiga, mengembangkan sektor-sektor ekonomi domestik yang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri dan tahan terhadap guncangan eksternal. Konflik Palestina-Israel memberikan gambaran jelas tentang bagaimana perang dan ketidakstabilan politik dapat berdampak luas pada perdagangan internasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga oleh negara-negara lain yang terhubung melalui jaringan perdagangan global. Bagi Indonesia, memahami dan mengantisipasi dampak-dampak ini adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.

Dalam konteks yang lebih luas, upaya bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan konflik adalah langkah penting yang tidak hanya akan menguntungkan negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga komunitas global secara keseluruhan⁵. Mendorong dialog, memperkuat hubungan diplomatik, dan menyediakan bantuan kemanusiaan adalah beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan ini. Indonesia, dengan posisi strategisnya di kancah internasional, dapat memainkan peran penting dalam mendukung upaya perdamaian dan stabilitas global. Konsep wanprestasi dalam konteks perdagangan internasional merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam perjanjian perdagangan. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pengiriman barang, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, atau kegagalan dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Dalam hukum internasional, wanprestasi diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) dan Prinsip-Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Dagang Internasional⁶.

Wanprestasi memiliki dampak yang signifikan dalam perdagangan internasional karena dapat mengakibatkan kerugian finansial, penurunan reputasi, dan ketidakpercayaan antar pelaku bisnis. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmen mereka kepada pelanggan atau mitra bisnis mereka. Hal ini dapat mengakibatkan rantai pasok terganggu, produksi tertunda, dan peluang bisnis hilang. Selain itu, wanprestasi juga sering kali menyebabkan perselisihan hukum yang dapat memakan waktu dan biaya, serta memperburuk hubungan bisnis yang sebelumnya baik⁷. Dalam konteks perdagangan internasional, wanprestasi sering kali dipicu oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali pihak yang terlibat dalam perjanjian. Peperangan, seperti yang terjadi antara Palestina dan Israel, adalah salah satu contoh faktor eksternal yang dapat menyebabkan wanprestasi. Konflik bersenjata mengganggu arus perdagangan, merusak infrastruktur, dan menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Sebagai akibatnya, pelaku bisnis mungkin tidak dapat memenuhi komitmen mereka tepat waktu atau sama sekali tidak dapat melakukannya, mengakibatkan wanprestasi.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hubungan perdagangan global yang signifikan, sangat relevan untuk membahas topik ini. Posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara dan keanggotaan aktifnya dalam organisasi internasional seperti ASEAN, WTO, dan APEC membuatnya terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional. Indonesia

⁵ Oded Shenkar, Yadong Luo, and Tailan Chi, *International Business*, 4th ed. (New York: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9781003034315>. 101-103.

⁶ Daniela Huber, "Equal Rights as a Basis for Just Peace: A European Paradigm Shift for Israel/Palestine" (Istituto Affari Internazionali (IAI), 2021), <https://www.jstor.org/stable/resrep28797.76-80>

⁷ Zaha Hassan et al., "Breaking the Israel-Palestine Status Quo" (Carnegie Endowment for International Peace, 2021), <https://www.jstor.org/stable/resrep31132.10-11>

juga memiliki ekonomi yang bergantung pada ekspor dan impor berbagai komoditas, termasuk minyak sawit, karet, tekstil, dan elektronik. Oleh karena itu, stabilitas dan keandalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual adalah kunci untuk menjaga hubungan dagang yang sehat dan berkelanjutan⁸.

Dalam situasi konflik seperti peperangan antara Palestina dan Israel, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap kontrak perdagangan internasional. Peperangan dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global, menghambat pengiriman barang, dan menciptakan ketidakpastian pasar yang dapat mempengaruhi seluruh ekosistem perdagangan internasional⁹. Ketika konflik terjadi, Indonesia mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku penting atau mengekspor produk-produknya ke pasar global. Sebagai contoh, jika jalur pelayaran utama terhambat akibat konflik, barang-barang yang dikirim dari atau menuju Indonesia bisa mengalami keterlambatan, meningkatkan risiko wanprestasi. Lebih lanjut, relevansi topik ini bagi Indonesia juga tercermin dari pentingnya pasar internasional bagi pertumbuhan ekonominya. Indonesia adalah salah satu eksportir utama berbagai komoditas, dan gangguan dalam perdagangan internasional dapat berdampak langsung pada pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara yang berupaya meningkatkan daya saing global, Indonesia perlu memastikan bahwa semua pihak dalam rantai perdagangan dapat memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah disepakati¹⁰. Wanprestasi yang terjadi akibat faktor eksternal seperti peperangan dapat merusak reputasi Indonesia sebagai mitra dagang yang andal.

Untuk mengurangi risiko wanprestasi dalam konteks perdagangan internasional, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, diversifikasi pasar dan mitra dagang. Dengan tidak terlalu bergantung pada beberapa negara atau kawasan tertentu, Indonesia dapat mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakstabilan politik atau konflik di satu wilayah. Kedua, penguatan infrastruktur logistik domestik. Dengan memiliki sistem logistik yang efisien dan andal, Indonesia dapat mengurangi dampak gangguan eksternal pada rantai pasokan. Ketiga, peran aktif dalam diplomasi internasional. Indonesia dapat mendorong dialog dan kerjasama internasional untuk mengurangi ketegangan global dan mempromosikan stabilitas regional. Selain itu, peran teknologi juga penting dalam mengelola risiko wanprestasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat membantu dalam pemantauan dan pengelolaan rantai pasokan secara real-time. Sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk memantau status pengiriman, mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi, dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan dengan transparansi tinggi, mengurangi risiko penipuan, dan memastikan kepatuhan terhadap kontrak.

Relevansi topik ini bagi Indonesia juga terlihat dari kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan daya saing ekspor. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung sektor ekspor, termasuk insentif pajak, pembiayaan ekspor, dan dukungan teknis. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat tergantung pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kontraktual mereka di tengah situasi global yang tidak menentu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang wanprestasi dan cara mengelolanya menjadi sangat penting bagi semua pelaku bisnis dan pembuat kebijakan di Indonesia. Dalam situasi konflik internasional, seperti peperangan antara Palestina dan Israel,

⁸ Giancarlo Gandolfo, *International Trade Theory and Policy* (Springer Science & Business Media, 2013). 100.

⁹ Hassan et al., "Breaking the Israel-Palestine Status Quo." 13.

¹⁰ Joost H. B. Pauwelyn, Andrew Guzman, and Jennifer A. Hillman, *International Trade Law* (Aspen Publishing, 2016). 60.

Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama dengan komunitas internasional untuk mengatasi dampak negatif dari konflik tersebut. Partisipasi aktif dalam forum-forum internasional, seperti PBB, WTO, dan ASEAN, dapat membantu Indonesia dalam menyuarakan kepentingannya dan mencari solusi bersama untuk mengatasi gangguan perdagangan global¹¹. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk membuka pasar baru dan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara yang relatif stabil. Secara keseluruhan, wanprestasi dalam konteks perdagangan internasional adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian khusus, terutama bagi negara seperti Indonesia yang memiliki keterlibatan signifikan dalam perdagangan global. Peperangan dan konflik internasional menambah lapisan ketidakpastian yang dapat mengganggu kepatuhan terhadap kontrak perdagangan¹². Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengelola risiko wanprestasi, memastikan keberlanjutan hubungan dagang, dan melindungi kepentingan ekonominya di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

Dalam upaya ini, peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi internasional, sangat krusial. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan perdagangan internasional, sementara pelaku bisnis perlu mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen risiko dan pemenuhan kontrak. Organisasi internasional, di sisi lain, dapat menyediakan platform untuk dialog dan kerjasama yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan global dan mempromosikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan¹³. Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah dampak peperangan antara Palestina dan Israel terhadap wanprestasi dalam perdagangan internasional Indonesia, yang berpotensi mengganggu rantai pasokan, menurunkan reputasi bisnis, dan menyebabkan kerugian finansial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana konflik tersebut mempengaruhi kepatuhan kontrak perdagangan internasional Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang muncul, dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya stabilitas dan keandalan perdagangan internasional bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia; dengan memahami dan mengelola risiko wanprestasi, Indonesia dapat menjaga hubungan dagang yang sehat, meningkatkan daya saing global, dan memastikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peperangan Palestina-Israel mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia?
2. Apa saja bentuk wanprestasi yang mungkin timbul akibat situasi tersebut?
3. Langkah apa yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari wanprestasi ini?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak peperangan Palestina-Israel terhadap perdagangan internasional Indonesia.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi dampak negatif wanprestasi terhadap perdagangan internasional Indonesia.

¹¹ Michael J. Hiscox, *International Trade and Political Conflict: Commerce, Coalitions, and Mobility* (Princeton University Press, 2020).11-12.

¹² Wambrauw et al., "IN-DEPTH ANALYSIS OF THE DYNAMICS POST-ISRAEL-PALESTINE CONFLICT 2023."

¹³ Alejandro Colás, *International Civil Society: Social Movements in World Politics* (John Wiley & Sons, 2013).29-31.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif analitik bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang ada serta menganalisis data untuk memahami hubungan sebab-akibat atau korelasi antara berbagai variabel. Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan dampak peperangan antara Palestina dan Israel terhadap wanprestasi dalam perdagangan internasional Indonesia, serta menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks dan dinamis, yang tidak dapat sepenuhnya diukur dengan metode kuantitatif¹⁴. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi para pelaku bisnis dan pakar perdagangan internasional, yang sangat penting untuk memahami nuansa dan konteks dari permasalahan yang diteliti. Melalui kajian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak konflik Palestina-Israel terhadap perdagangan internasional Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui kajian Pustaka dan analisis konten. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dari mereka yang terlibat dalam perdagangan internasional dan yang dapat memberikan informasi terkini mengenai dampak konflik tersebut¹⁵. Pakar perdagangan internasional dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang dinamika global dan regional, sementara pelaku bisnis dapat memberikan gambaran konkret tentang tantangan operasional dan strategi mitigasi yang mereka terapkan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen serta laporan yang relevan. Studi pustaka melibatkan penelusuran literatur akademik, artikel jurnal, buku, dan publikasi lainnya yang membahas topik-topik terkait seperti perdagangan internasional, wanprestasi, konflik Palestina-Israel, dan dampaknya terhadap ekonomi global¹⁶. Penelitian ini juga akan mencakup laporan dari organisasi internasional, seperti WTO, UNCTAD, dan World Bank, yang menyediakan data dan analisis mengenai perdagangan internasional dan dampak konflik.

Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan berbagai laporan perusahaan, laporan tahunan, dan dokumen kebijakan yang dapat memberikan informasi tambahan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia dan pemerintah merespons situasi konflik. Dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks tambahan dan memperkaya data primer yang diperoleh dari wawancara. Peneliti juga akan memeriksa laporan berita dari media internasional dan nasional untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan terkini dan bagaimana media melaporkan dampak konflik terhadap perdagangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, studi pustaka, dan analisis dokumen serta laporan. Wawancara merupakan teknik utama untuk mengumpulkan data primer, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pakar dan pelaku bisnis. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari literatur yang ada, yang membantu dalam membangun landasan teori dan konteks penelitian. Analisis dokumen dan laporan melengkapi data primer dan sekunder dengan menyediakan informasi empiris yang dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis konten untuk data kualitatif¹⁷. Analisis konten melibatkan proses sistematis untuk

¹⁴ Michelle E. Kiger and Lara Varpio, "Thematic Analysis of Qualitative Data: AMEE Guide No. 131," *Medical Teacher* 42, no. 8 (August 2020): 846–54, <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>.

¹⁵ Marcus B. Weaver-Hightower, *How to Write Qualitative Research* (Routledge, 2018).

¹⁶ Audie Klotz and Deepa Prakash, eds., *Qualitative Methods in International Relations* (London: Palgrave Macmillan UK, 2008), <https://doi.org/10.1057/9780230584129>.

¹⁷ Kiger and Varpio, "Thematic Analysis of Qualitative Data."

mengkategorikan dan menginterpretasikan data teks yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan literatur. Langkah pertama dalam analisis konten adalah transkripsi data wawancara dan pengumpulan dokumen serta laporan yang relevan. Setelah itu, peneliti akan membaca secara menyeluruh data tersebut untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kategori yang muncul.

Proses analisis konten melibatkan beberapa tahap, termasuk pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi. Pengkodean adalah langkah awal di mana peneliti memberikan label pada segmen-segmen data yang dianggap relevan dengan pertanyaan penelitian. Misalnya, segmen data yang menggambarkan gangguan rantai pasokan akibat konflik dapat diberi kode "gangguan rantai pasokan." Kategorisasi adalah langkah selanjutnya di mana kode-kode yang serupa dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar dan bermakna, seperti "dampak operasional," "dampak finansial," atau "strategi mitigasi." Setelah data dikategorikan, peneliti akan menginterpretasikan temuan dengan menghubungkan kategori-kategori tersebut dengan pertanyaan penelitian dan teori yang relevan. Interpretasi ini membantu dalam memahami hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia dan bagaimana konflik Palestina-Israel berkontribusi terhadap wanprestasi. Peneliti juga akan mencari pola dan hubungan yang lebih luas dalam data untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika yang kompleks ini.

Keandalan dan validitas dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Untuk meningkatkan keandalan, peneliti akan menggunakan triangulasi data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber dan metode untuk mengkonfirmasi temuan. Misalnya, informasi yang diperoleh dari wawancara dapat diverifikasi dengan data dari dokumen dan laporan. Selain itu, peneliti akan melakukan cross-checking dengan responden untuk memastikan bahwa interpretasi data mereka akurat. Validitas dalam penelitian kualitatif dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data transparan dan dapat dilacak. Peneliti akan mendokumentasikan setiap langkah dalam proses penelitian, mulai dari perencanaan wawancara hingga analisis data, sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain.¹⁸ Peneliti juga akan menggunakan teknik member checking, yaitu meminta responden untuk meninjau dan memberikan umpan balik terhadap temuan sementara, untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan responden. Selain itu, peneliti akan mempertimbangkan etika penelitian dengan memastikan bahwa semua responden memberikan persetujuan informasi sebelum wawancara dilakukan. Kerahasiaan dan privasi responden akan dijaga dengan tidak mengungkapkan identitas mereka tanpa izin. Peneliti juga akan memastikan bahwa hasil penelitian disajikan secara objektif dan tidak bias, dengan mengakui keterbatasan penelitian dan potensi konflik kepentingan.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang dampak konflik Palestina-Israel terhadap wanprestasi dalam perdagangan internasional Indonesia.¹⁹ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan kontrak dan memberikan rekomendasi praktis untuk mengurangi risiko wanprestasi. Melalui wawancara dengan pakar dan pelaku bisnis, serta analisis literatur dan dokumen, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional dan meningkatkan daya saing global. Dengan demikian, metode penelitian yang komprehensif ini akan membantu dalam mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis dampak konflik terhadap perdagangan internasional Indonesia dan

¹⁸ Hightower, *How to Write Qualitative Research*.

¹⁹ Klotz and Prakash, *Qualitative Methods in International Relations*.

memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko. Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian ini untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur akademik dan praktik bisnis, dengan menyediakan wawasan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pelaku bisnis untuk mengelola risiko wanprestasi dalam konteks perdagangan internasional yang dinamis dan penuh tantangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Peperangan Palestina-Israel terhadap Perdagangan Internasional

Peperangan antara Palestina dan Israel memiliki dampak signifikan yang merembes jauh ke berbagai aspek perdagangan internasional. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik di wilayah yang terlibat, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian yang meluas ke pasar global²⁰. Dampak tersebut dapat dilihat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rantai pasok global. Pengaruh langsung dari konflik ini termasuk gangguan pada jalur transportasi utama, peningkatan biaya logistik, dan penundaan pengiriman barang. Sementara itu, pengaruh tidak langsung mencakup ketidakpastian pasar, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan pola investasi. Pengaruh langsung terhadap rantai pasok global terutama terlihat dari gangguan transportasi di jalur-jalur penting yang melintasi atau berdekatan dengan wilayah konflik²¹. Terusan Suez, sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sering kali menjadi titik perhatian utama. Ketidakstabilan di wilayah sekitar Terusan Suez dapat menyebabkan penutupan sementara atau penundaan pengiriman, yang berdampak langsung pada waktu transit barang dan biaya pengiriman. Contoh konkret adalah ketika insiden kapal Ever Given yang terjebak di Terusan Suez pada tahun 2021, meskipun bukan akibat langsung dari konflik Palestina-Israel, menunjukkan betapa rentannya rantai pasok global terhadap gangguan di jalur kritis ini. Setiap eskalasi konflik di Timur Tengah meningkatkan risiko terjadinya gangguan serupa, yang dapat memperparah situasi perdagangan global.

Selain gangguan transportasi, peningkatan biaya logistik juga menjadi salah satu dampak langsung dari konflik Palestina-Israel. Ketika situasi keamanan memburuk, perusahaan logistik harus mengadopsi rute alternatif yang lebih panjang dan mahal untuk menghindari daerah berisiko tinggi. Hal ini tidak hanya menambah biaya bahan bakar dan operasional, tetapi juga mengurangi efisiensi waktu pengiriman. Sebagai akibatnya, harga barang yang diangkut meningkat, yang kemudian diteruskan ke konsumen akhir. Peningkatan biaya logistik ini dapat menyebabkan inflasi di pasar global, yang merugikan daya beli konsumen dan mengurangi volume perdagangan²². Penundaan pengiriman barang adalah dampak langsung lain yang sering terjadi akibat konflik. Ketidakstabilan di wilayah konflik dapat mengakibatkan penutupan pelabuhan, bandara, dan jalan raya yang penting untuk transportasi barang. Penundaan ini tidak hanya mengganggu jadwal produksi dan distribusi, tetapi juga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi eksportir dan importir. Dalam situasi di mana waktu adalah faktor kritis, seperti pengiriman barang-barang yang mudah rusak atau produk teknologi tinggi, penundaan pengiriman dapat menyebabkan kerugian yang tidak terukur. Sebagai contoh, produk elektronik yang dirancang untuk diluncurkan pada tanggal tertentu mungkin kehilangan momentum pasar jika pengirimannya tertunda akibat gangguan di rantai pasok.

Di sisi lain, pengaruh tidak langsung dari konflik Palestina-Israel terhadap rantai pasok global lebih bersifat jangka panjang dan kompleks. Ketidakpastian pasar adalah salah satu

²⁰ Hassan et al., "Breaking the Israel-Palestine Status Quo."

²¹ Bartov, Israel-Palestine.

²² Hiscox, International Trade and Political Conflict.

dampak tidak langsung utama yang dihadapi oleh pelaku perdagangan internasional²³. Setiap eskalasi konflik meningkatkan ketidakpastian mengenai stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan investasi dan perdagangan. Investor cenderung menghindari wilayah yang berisiko tinggi dan mencari pasar yang lebih stabil, yang dapat mengakibatkan penurunan investasi asing langsung (FDI) di kawasan tersebut.²⁴ Penurunan FDI ini berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang sangat diperlukan untuk mendukung perdagangan internasional yang berkelanjutan.

Fluktuasi harga komoditas adalah dampak tidak langsung lain yang signifikan dari konflik ini. Timur Tengah adalah salah satu kawasan penghasil minyak terbesar di dunia, dan ketidakstabilan di wilayah ini sering kali mempengaruhi harga minyak global. Setiap eskalasi konflik cenderung memicu kenaikan harga minyak karena kekhawatiran akan gangguan pasokan. Kenaikan harga minyak tidak hanya mempengaruhi biaya energi, tetapi juga biaya produksi dan distribusi barang secara keseluruhan. Fluktuasi harga komoditas ini menciptakan ketidakpastian tambahan bagi pelaku perdagangan, yang harus menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk mengatasi perubahan harga yang tidak terduga. Selain itu, perubahan pola investasi juga merupakan dampak tidak langsung dari konflik Palestina-Israel. Ketidakstabilan di kawasan tersebut mendorong investor untuk mengalihkan modal mereka ke wilayah yang lebih aman dan stabil. Ini dapat mengakibatkan penurunan aliran modal ke Timur Tengah dan sebaliknya meningkatkan aliran modal ke kawasan lain, seperti Asia Tenggara atau Amerika Latin²⁵. Perubahan pola investasi ini berdampak pada distribusi sumber daya global dan dapat mempengaruhi dinamika perdagangan internasional dalam jangka panjang.

Di Indonesia, dampak dari konflik Palestina-Israel juga dirasakan secara signifikan, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Sebagai negara dengan hubungan perdagangan global yang luas, Indonesia tidak luput dari pengaruh negatif ketidakstabilan di Timur Tengah. Salah satu contoh spesifik adalah gangguan pada impor minyak. Indonesia mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, dan setiap gangguan pasokan atau kenaikan harga minyak akibat konflik akan berdampak langsung pada ekonomi domestik. Kenaikan harga minyak menyebabkan peningkatan biaya energi, yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan distribusi di berbagai sektor. Selain itu, eksportir Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengakses pasar di Timur Tengah selama periode konflik. Produk-produk Indonesia seperti minyak sawit, karet, dan tekstil sering kali menghadapi hambatan logistik dan tarif yang lebih tinggi ketika dikirim ke wilayah konflik. Situasi ini mengharuskan eksportir untuk mencari pasar alternatif atau menghadapi penurunan volume ekspor, yang dapat mengurangi pendapatan nasional dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Kasus-kasus spesifik menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia telah merasakan dampak nyata dari ketidakstabilan di Timur Tengah. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor teknologi informasi dan komunikasi mengalami kesulitan dalam mendapatkan komponen elektronik yang diimpor dari kawasan tersebut²⁶. Penundaan pengiriman dan peningkatan biaya logistik membuat perusahaan-perusahaan ini harus mencari sumber alternatif atau menanggung kerugian finansial. Selain itu, sektor pertanian yang bergantung pada impor pupuk dan bahan kimia dari Timur Tengah juga menghadapi tantangan serupa.

Untuk mengatasi dampak ini, beberapa perusahaan Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis seperti diversifikasi sumber pasokan dan pasar. Misalnya, beberapa eksportir

²³ Ka Zeng, *Trade Threats, Trade Wars: Bargaining, Retaliation, and American Coercive Diplomacy* (University of Michigan Press, 2010).

²⁴ Bartov, *Israel-Palestine*.

²⁵ Hiscox, *International Trade and Political Conflict*.

²⁶ Zeng, *Trade Threats, Trade Wars*.

telah mulai mencari pasar baru di Afrika dan Amerika Latin untuk mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah. Di sisi lain, perusahaan yang bergerak di sektor energi telah mulai mengembangkan sumber energi alternatif seperti energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak.²⁷ Langkah-langkah ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakstabilan di Timur Tengah dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, dan pemerintah Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam mendukung pelaku bisnis untuk mengatasi dampak konflik ini. Kebijakan perdagangan yang proaktif, dukungan finansial untuk diversifikasi pasar, dan investasi dalam infrastruktur logistik adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Selain itu, diplomasi ekonomi juga penting untuk memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara yang lebih stabil dan mendorong kerjasama internasional untuk mengurangi ketegangan global.

Bentuk Wanprestasi dalam Perdagangan Internasional Indonesia

Wanprestasi dalam perdagangan internasional adalah isu yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai bentuk pelanggaran kontrak yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks perdagangan internasional Indonesia, beberapa bentuk wanprestasi yang paling umum meliputi keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pelanggaran ketentuan kontrak. Peperangan antara Palestina dan Israel telah memperburuk situasi ini, menambah lapisan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Indonesia yang terlibat dalam perdagangan global²⁸. Salah satu bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman. Dalam perdagangan internasional, ketepatan waktu adalah faktor yang sangat penting karena keterlambatan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Keterlambatan pengiriman barang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan logistik yang diakibatkan oleh peperangan. Peperangan antara Palestina dan Israel sering kali mengganggu jalur transportasi utama, seperti Terusan Suez, yang merupakan jalur kritis bagi pengiriman barang dari dan ke Eropa serta Timur Tengah. Ketika jalur ini terganggu, barang-barang yang seharusnya tiba tepat waktu menjadi tertunda, menyebabkan perusahaan-perusahaan Indonesia tidak dapat memenuhi komitmen pengiriman mereka kepada mitra dagang internasional.

Menurut hukum kontrak, keterlambatan pengiriman dapat dianggap sebagai wanprestasi jika tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam kontrak.²⁹ Dalam banyak kasus, pihak yang dirugikan oleh keterlambatan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Misalnya, dalam kasus ekspor produk pertanian yang memiliki masa kadaluarsa singkat, keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan barang menjadi tidak layak jual. Kontrak perdagangan internasional biasanya mencakup klausul yang menetapkan konsekuensi hukum bagi pihak yang gagal memenuhi kewajiban pengiriman tepat waktu, termasuk penalti finansial atau kompensasi atas kerugian. Kerusakan barang selama proses pengiriman juga merupakan bentuk wanprestasi yang umum dalam perdagangan internasional. Kerusakan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti penanganan yang buruk, kondisi cuaca ekstrem, atau tindakan sabotase selama peperangan. Konflik Palestina-Israel sering kali menyebabkan situasi yang tidak aman bagi pengiriman barang, meningkatkan risiko kerusakan barang yang dikirim melalui wilayah yang terpengaruh konflik. Kerusakan barang tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial langsung bagi pengirim, tetapi juga dapat merusak reputasi mereka di pasar internasional.

²⁷ Shenkar, Luo, and Chi, *International Business*.

²⁸ Ronald Findlay and Kevin H. O'Rourke, *Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium* (Princeton University Press, 2009).

²⁹ Wambrauw et al., "IN-DEPTH ANALYSIS OF THE DYNAMICS POST-ISRAEL-PALESTINE CONFLICT 2023."

Dalam kerangka hukum, kerusakan barang selama pengiriman diatur oleh berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG). CISG menetapkan bahwa penjual bertanggung jawab atas kualitas barang hingga barang tersebut diterima oleh pembeli. Jika barang rusak selama pengiriman, penjual dapat dianggap melakukan wanprestasi kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka, seperti *force majeure*.³⁰ Namun, konsep *force majeure* ini sendiri sering kali menjadi subjek perdebatan hukum, terutama dalam konteks konflik bersenjata, di mana pihak yang terlibat harus menunjukkan bahwa konflik tersebut memang benar-benar menghalangi pemenuhan kewajiban kontraktual mereka³¹.

Pelanggaran ketentuan kontrak adalah bentuk wanprestasi yang lebih luas dan dapat mencakup berbagai tindakan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Peperangan dapat menyebabkan berbagai pelanggaran kontrak, mulai dari ketidakmampuan untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi hingga kegagalan untuk mematuhi jadwal produksi dan pengiriman. Misalnya, perusahaan yang mengimpor komponen elektronik dari Timur Tengah mungkin mengalami gangguan pasokan yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi komitmen produksi sesuai kontrak dengan klien mereka. Hukum kontrak internasional menyediakan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran ini, termasuk hak untuk membatalkan kontrak, menuntut ganti rugi, atau meminta pengadilan untuk memaksa pemenuhan kewajiban kontraktual. Dalam banyak kasus, pihak yang dirugikan oleh pelanggaran kontrak akan mencari kompensasi finansial untuk menutupi kerugian yang diderita. Selain itu, kontrak perdagangan internasional sering kali mencakup klausul arbitrase, yang mengharuskan sengketa diselesaikan melalui arbitrase daripada melalui pengadilan nasional. Arbitrase internasional dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam situasi di mana sengketa lintas negara sulit diselesaikan melalui sistem hukum domestik.

Beberapa perusahaan Indonesia telah mengalami langsung dampak dari peperangan Palestina-Israel dalam bentuk wanprestasi. Misalnya, sebuah perusahaan eksportir tekstil di Bandung yang rutin mengirimkan produknya ke Eropa melalui jalur laut menghadapi keterlambatan signifikan akibat gangguan di Terusan Suez selama periode eskalasi konflik³². Keterlambatan ini menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan kontrak dengan salah satu klien utamanya di Eropa, yang beralih ke pemasok lain. Akibatnya, perusahaan tersebut tidak hanya mengalami kerugian finansial langsung tetapi juga kerugian jangka panjang berupa hilangnya kepercayaan dan reputasi di pasar internasional.³³ Dalam kasus lain, sebuah perusahaan agribisnis yang mengimpor pupuk dari Timur Tengah mengalami kerusakan barang selama pengiriman karena penanganan yang buruk di wilayah konflik. Kerusakan ini menyebabkan pupuk tidak dapat digunakan, mengakibatkan kerugian besar karena perusahaan harus mencari sumber pasokan alternatif dengan biaya yang lebih tinggi. Perusahaan tersebut kemudian mengambil langkah hukum untuk menuntut kompensasi dari perusahaan pengiriman, namun proses hukum tersebut memakan waktu lama dan biaya tinggi, menunjukkan betapa kompleksnya penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan internasional.

Dari segi hukum, kasus-kasus ini menunjukkan perlunya perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menyusun kontrak perdagangan internasional dengan sangat hati-hati,

³⁰ Susan Strange, "Debt and Default in the International Political Economy," in *Debt And The Less Developed Countries* (Routledge, 1980).

³¹ Pauwelyn, Guzman, and Hillman, *International Trade Law*.

³² Ademola Abass, *Complete International Law: Text, Cases, and Materials* (Oxford University Press, 2014).

³³ JaeBin Ahn, "A Theory of Domestic and International Trade Finance," in *Emerging Market Finance: New Challenges and Opportunities*, ed. Bang Nam Jeon and Ji Wu, vol. 21, *International Finance Review* (Emerald Publishing Limited, 2020), 203–29, <https://doi.org/10.1108/S1569-376720200000021012>.

termasuk memasukkan klausul-klausul yang mengatur force majeure, arbitrase, dan ganti rugi secara jelas.³⁴ Dengan demikian, mereka dapat lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga seperti konflik bersenjata. Selain itu, perusahaan perlu melakukan analisis risiko secara berkala dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif, seperti diversifikasi sumber pasokan dan pasar, untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan geopolitik. Untuk memitigasi risiko wanprestasi akibat peperangan, pemerintah Indonesia juga memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan dan regulasi yang tepat. Misalnya, pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara perusahaan dan mitra dagang internasional untuk menyusun kesepakatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi krisis. Selain itu, pengembangan infrastruktur logistik domestik yang kuat dapat membantu mengurangi ketergantungan pada jalur transportasi internasional yang rentan terhadap gangguan.

Strategi Mitigasi Wanprestasi

Untuk menghadapi risiko wanprestasi dalam perdagangan internasional yang disebabkan oleh konflik seperti peperangan Palestina-Israel, pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang efektif. Salah satu langkah utama yang bisa diambil oleh pemerintah adalah menyusun regulasi khusus yang mengatur force majeure dalam kontrak perdagangan internasional, termasuk ketentuan khusus untuk situasi konflik bersenjata. Regulasi semacam ini akan memberikan panduan yang jelas bagi perusahaan-perusahaan dalam menyusun kontrak mereka dan mengklaim pengecualian akibat kejadian luar biasa yang tidak terduga. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, perusahaan akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menghadapi situasi tidak terduga yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak perdagangan internasional.³⁵

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat lembaga fasilitasi perdagangan seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan untuk membantu perusahaan dalam mengelola risiko dan menyusun strategi mitigasi yang efektif. Lembaga-lembaga ini dapat menyediakan informasi terkini mengenai situasi geopolitik dan dampaknya terhadap perdagangan internasional, serta memberikan bantuan hukum dan konsultasi bisnis kepada perusahaan-perusahaan yang terkena dampak. Dengan demikian, perusahaan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang timbul akibat ketidakstabilan geopolitik dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko wanprestasi. Peningkatan investasi dalam infrastruktur logistik domestik juga merupakan langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada jalur internasional yang rentan terhadap gangguan. Pengembangan dan modernisasi infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat akan meningkatkan efisiensi dan keandalan rantai pasok domestik, sehingga perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengelola pengiriman barang.³⁶ Infrastruktur yang kuat dan andal akan membantu perusahaan menghadapi situasi darurat dan mengurangi dampak negatif dari gangguan transportasi internasional yang sering kali terjadi akibat konflik bersenjata.

Di sisi lain, kerjasama internasional juga memainkan peran penting dalam mengatasi risiko wanprestasi.³⁷ Melalui kerjasama dengan negara-negara mitra dagang, pemerintah dapat mendorong penandatanganan perjanjian bilateral atau multilateral yang mencakup ketentuan khusus untuk mengatasi risiko wanprestasi akibat konflik. Perjanjian semacam ini bisa mencakup pengaturan mengenai arbitrase internasional dan mekanisme penyelesaian

³⁴ Alan N. Rechtschaffen, *Capital Markets, Derivatives, and the Law: Positivity and Preparation* (Oxford University Press, 2019).

³⁵ Strange, "Debt and Default in the International Political Economy."

³⁶ Gandolfo, *International Trade Theory and Policy*.

³⁷ Larry A. DiMatteo, *International Business Law and the Legal Environment: A Transactional Approach* (Routledge, 2016).

sengketa yang efisien, sehingga perusahaan-perusahaan memiliki saluran hukum yang jelas dan cepat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat situasi darurat. Perusahaan-perusahaan Indonesia juga perlu proaktif dalam mengelola risiko wanprestasi melalui berbagai strategi yang melibatkan perencanaan, penilaian risiko, dan adaptasi operasional. Diversifikasi pasar dan sumber pasokan adalah salah satu strategi utama yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada wilayah yang rentan terhadap konflik. Dengan memiliki beberapa alternatif pasokan dan pasar, perusahaan dapat lebih mudah beradaptasi terhadap gangguan yang terjadi di satu lokasi dan menjaga kelancaran operasi mereka. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa kontrak perdagangan internasional mereka mencakup klausul *force majeure* yang jelas, serta ketentuan tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Kontrak yang dirancang dengan baik akan memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam situasi yang tidak terduga dan membantu perusahaan menghindari sengketa yang berkepanjangan.³⁸

Mengambil asuransi perdagangan internasional juga merupakan langkah yang bijak untuk melindungi perusahaan dari risiko wanprestasi. Asuransi ini dapat memberikan perlindungan finansial terhadap kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak. Dengan adanya asuransi, perusahaan dapat meminimalkan kerugian finansial yang timbul akibat gangguan dalam perdagangan internasional dan lebih fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas operasional mereka.³⁹ Pengelolaan rantai pasok yang efektif juga menjadi kunci dalam mengurangi risiko wanprestasi. Perusahaan harus mengimplementasikan sistem manajemen rantai pasok yang efektif untuk memantau dan mengelola setiap tahap dalam proses pengadaan dan distribusi. Teknologi seperti sistem manajemen logistik berbasis digital dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi gangguan dan mengimplementasikan solusi tepat waktu. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan penyedia jasa logistik juga penting untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan dalam mengelola pengiriman barang dengan lebih baik. Mitra logistik yang berpengalaman dapat menawarkan solusi alternatif dan mendukung kelancaran operasi meskipun ada gangguan.

Dalam menghadapi risiko wanprestasi, analisis kebijakan perdagangan internasional yang relevan juga penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perusahaan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) adalah salah satu kerangka hukum internasional yang dapat membantu mengurangi risiko sengketa dan memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih efisien. Implementasi CISG dalam kontrak perdagangan internasional akan membantu perusahaan dalam menavigasi kompleksitas perdagangan global dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam situasi yang tidak terduga.⁴⁰ Arbitrase internasional juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam perdagangan internasional. Perjanjian arbitrase memberikan jalan alternatif selain pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien. Penggunaan arbitrase internasional dapat membantu perusahaan menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Selain itu, perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral antara Indonesia dan negara-negara lain juga dapat mencakup ketentuan khusus yang membantu mengatasi risiko wanprestasi. Perjanjian ini sering kali mencakup klausul yang mengatur penyelesaian sengketa dan perlindungan investasi, yang dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan Indonesia.

³⁸ Zeng, *Trade Threats, Trade Wars*.

³⁹ Rechtschaffen, *Capital Markets, Derivatives, and the Law*.

⁴⁰ Huber, "Equal Rights as a Basis for Just Peace."

Kebijakan ekspor-impor nasional yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia juga harus mendukung kelancaran perdagangan internasional dan mengurangi hambatan yang mungkin timbul akibat situasi konflik.⁴¹ Kebijakan ini dapat mencakup insentif untuk diversifikasi pasar, dukungan finansial untuk perusahaan yang terdampak, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga internasional untuk menangani gangguan perdagangan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, perusahaan-perusahaan Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang timbul akibat ketidakstabilan geopolitik dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko wanprestasi.⁴² Dalam menghadapi risiko wanprestasi akibat konflik seperti Palestina-Israel, kombinasi dari kebijakan pemerintah yang proaktif, strategi perusahaan yang komprehensif, dan penerapan kebijakan perdagangan internasional yang relevan adalah kunci untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan perdagangan internasional Indonesia.⁴³ Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar global dan mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian geopolitik. Pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif dan memastikan bahwa kontrak perdagangan internasional disusun dengan cermat, mencakup semua ketentuan yang diperlukan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Selain itu, dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur logistik dan memperkuat kerjasama internasional, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada jalur internasional yang rentan terhadap gangguan dan meningkatkan efisiensi serta keandalan rantai pasok domestik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, risiko wanprestasi dapat diminimalisir, dan perdagangan internasional Indonesia dapat tetap berlanjut dengan stabilitas dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Konflik Palestina-Israel memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia. Peperangan tersebut menyebabkan gangguan besar pada rantai pasok global, terutama melalui jalur-jalur penting seperti Terusan Suez. Akibatnya, banyak perusahaan Indonesia mengalami keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak. Situasi ini mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan mengganggu stabilitas operasional perusahaan. Dampak ini menunjukkan betapa rentannya perdagangan internasional terhadap ketidakstabilan geopolitik dan pentingnya strategi mitigasi yang efektif. Bentuk-bentuk wanprestasi yang diidentifikasi meliputi keterlambatan pengiriman, di mana barang tiba lebih lambat dari waktu yang dijanjikan, kerusakan barang selama pengiriman akibat penanganan yang buruk atau kondisi yang tidak aman, dan pelanggaran ketentuan kontrak yang mencakup ketidakmampuan untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi atau jadwal. Setiap bentuk wanprestasi ini membawa implikasi hukum yang serius dan memerlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampaknya terhadap perdagangan internasional Indonesia. Untuk mengatasi dan mencegah wanprestasi, pemerintah Indonesia perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur force majeure dalam kontrak perdagangan internasional, serta memperkuat lembaga fasilitasi perdagangan untuk memberikan dukungan dan informasi kepada perusahaan. Investasi dalam infrastruktur logistik domestik juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada jalur internasional yang rentan terhadap gangguan. Bagi pelaku bisnis, diversifikasi pasar dan sumber pasokan, penyusunan kontrak yang komprehensif, pengambilan asuransi perdagangan internasional, dan pengelolaan rantai pasok yang efektif adalah langkah-langkah penting untuk mengelola

⁴¹ Hiscox, *International Trade and Political Conflict*.

⁴² Co?kun ?zer Ahu, *International Trade Policies in the Era of Globalization* (IGI Global, 2019).

⁴³ Hiscox, *International Trade and Political Conflict*.

risiko perdagangan internasional. Dengan strategi yang terkoordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia dapat lebih baik menghadapi tantangan dalam perdagangan internasional dan menjaga stabilitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abass, Ademola. *Complete International Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press, 2014.
- Ahn, JaeBin. "A Theory of Domestic and International Trade Finance." In *Emerging Market Finance: New Challenges and Opportunities*, edited by Bang Nam Jeon and Ji Wu, 21:203–29. *International Finance Review*. Emerald Publishing Limited, 2020. <https://doi.org/10.1108/S1569-376720200000021012>.
- Ahu, Co?kun ?zer. *International Trade Policies in the Era of Globalization*. IGI Global, 2019.
- Bartov, Omer. *Israel-Palestine: Lands and Peoples*. Berghahn Books, 2021.
- Colás, Alejandro. *International Civil Society: Social Movements in World Politics*. John Wiley & Sons, 2013.
- DiMatteo, Larry A. *International Business Law and the Legal Environment: A Transactional Approach*. Routledge, 2016.
- Findlay, Ronald, and Kevin H. O'Rourke. *Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium*. Princeton University Press, 2009.
- Gandolfo, Giancarlo. *International Trade Theory and Policy*. Springer Science & Business Media, 2013.
- Hassan, Zaha, Daniel Levy, Hallaamal Keir, and Marwan Muasher. "Breaking the Israel-Palestine Status Quo." *Carnegie Endowment for International Peace*, 2021. <https://www.jstor.org/stable/resrep31132>.
- Hiscox, Michael J. *International Trade and Political Conflict: Commerce, Coalitions, and Mobility*. Princeton University Press, 2020.
- Huber, Daniela. "Equal Rights as a Basis for Just Peace: A European Paradigm Shift for Israel/Palestine." *Istituto Affari Internazionali (IAI)*, 2021. <https://www.jstor.org/stable/resrep28797>.
- 'Adwān, Sāmī 'Abd al-Razzāq, Dan Bar-On, Eyal J. Naveh, and Peace Research Institute in the Middle East. *Side by Side: Parallel Histories of Israel-Palestine*. New Press, 2012.
- Kiger, Michelle E., and Lara Varpio. "Thematic Analysis of Qualitative Data: AMEE Guide No. 131." *Medical Teacher* 42, no. 8 (August 2020): 846–54. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>.
- Klotz, Audie, and Deepa Prakash, eds. *Qualitative Methods in International Relations*. London: Palgrave Macmillan UK, 2008. <https://doi.org/10.1057/9780230584129>.
- Pauwelyn, Joost H. B., Andrew Guzman, and Jennifer A. Hillman. *International Trade Law*. Aspen Publishing, 2016.
- Rechtschaffen, Alan N. *Capital Markets, Derivatives, and the Law: Positivity and Preparation*. Oxford University Press, 2019.
- Shenkar, Oded, Yadong Luo, and Tailan Chi. *International Business*. 4th ed. New York: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003034315>.
- Strange, Susan. "Debt and Default in the International Political Economy." In *Debt And The Less Developed Countries*. Routledge, 1980.
- Wambrau, Meyland S. F., Diego Romario De Fretes, M. Fathun Niam, Arie Fitria, and Marzuki Marzuki. "In-Depth Analysis Of The Dynamics Post-Israel-Palestine Conflict 2023: Political, Economic, And Social Implications For The Future Of Israel." *International Journal Of Society Reviews* 2, no. 1 (January 12, 2024): 223–36.

Weaver-Hightower, Marcus B. How to Write Qualitative Research. Routledge, 2018.
Zeng, Ka. Trade Threats, Trade Wars: Bargaining, Retaliation, and American Coercive Diplomacy. University of Michigan Press, 2010.